

KAPITALISASI PENDIDIKAN DAN PENGARUHNYA DI ACEH

Oleh: Teuku Zulkhairi

Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Islam Pascasarjana
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: abu.erbakan@gmail.com

Abstrak

Salah satu problem yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah kapitalisasi pendidikan. Problem ini merupakan efek dari kapitalisasi ekonomi yang dijalankan negara-negara maju yang merambah ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kapitalisasi pendidikan dalam berbagai bentuknya telah menyebabkan terjadinya ketimpangan di masyarakat. Masyarakat miskin menjadi sangat terbebani dengan biaya pendidikan yang tinggi. Bahkan bisa menghilangkan peluang akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin. Efek krusial dari kapitalisasi pendidikan adalah hilangnya tujuan pendidikan, dari tujuan luhur untuk memanusiakan manusia, menjadi sekedar *provit oriented*. Alhasil, tujuan pendidikan untuk membentuk karakter manusia akan kabur. Pendidikan akan dikuasai oleh hanya orang-orang kaya. Jika demikian kondisinya, lalu bagaimana nasib bangsa ini ke depan di tengah nestapa kemiskinan yang mendera bangsa ini? Saat institusi pendidikan menjalankan prosesi pendidikan hanya sekedar *provit oriented*, maka ruh pendidikan telah hilang, dan pendidikan sebagai wahana memanusiakan manusia tidak lagi bisa diharapkan. Kapitalisasi pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas telah sangat terasa memberikan pengaruhnya di Indonesia. Bahkan kini, dewasa ini kapitalisasi pendidikan mulai menancapkan pengaruhnya hingga di Aceh. Beberapa lembaga pendidikan di Aceh, dengan patokan standar biaya yang mahal, telah menyebabkan kesulitan masyarakat miskin untuk mengakses ke lembaga pendidikan tersebut. Sebagai provinsi yang sedang berjuang mengimplementasikan Syari'at Islam termasuk di ranah pendidikan, Aceh harus memperhatikan secara serius gejala masuknya virus kapitalisme di dunia pendidikan di Aceh. Sebab, bukan saja kapitalisasi tersebut akan menghilangkan hak-hak warga negara untuk mengakses pendidikan, namun juga akan sangat paradoksal dengan semangat Syari'at Islam di Aceh.

Keywords: kapitalisasi, pendidikan

A. Memahami Kapitalisasi Pendidikan

Kapitalisasi berasal dari kata *capital* dalam bahasa Inggris yang berarti modal. Dalam bahasa Indonesia kemudian disebut kapital yang disandarkan kepada kapitalisme sebagai suatu ideologi dalam bidang ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, kapitalisme merupakan sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas.¹

Sementara itu, pendidikan merupakan upaya untuk mendidik manusia agar menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.² Dalam konteks Islam, Ahmad D. Marimba mengemukakan, bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (*insan kamil*).³

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kapitalisasi pendidikan adalah proses atau upaya untuk menjadikan prinsip-prinsip kapitalisme⁴ digunakan di dalam sektor pendidikan dimana negara tidak membatasi kepemilikan perorangan di dalam sektor pendidikan. Artinya satuan penyelenggara pendidikan atau lembaga sekolah dapat dikuasai oleh perorangan baik swasta ataupun korporasi, sehingga segala kebijakannya diatur oleh sektor swasta tersebut. Pengelola sektor pendidikan ini, mulai bersaing antara satu dengan lainnya. Bagi pihak pengelola pendidikan yang memenangkan persaingan akan mendapatkan pengguna jasa pendidikan lebih banyak.⁵

¹Lihat: *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* edisi online, Link: <http://kbbi.web.id/kapitalisme>. Diakses tanggal 7 Januari 2017.

² Asep Sapa'at, *Stop Menjadi Guru*, (Jakarta: Tanga Pustaka, 2012), hal. 276.

³ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung Al-Ma'arif 1989, hlm. 19

⁴ Kapitalisme berarti suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya dengan bebas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sementara itu pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi pemilik modal.

⁵Sumber: http://zaynpedia.blogspot.co.id/2014/09/kapitalisasi-pendidikan-dampak_17.html. Diakses tanggal 7 Januari 2017.

Modal dari pihak pengelola sektor pendidikan pun akan masuk dan dapat diakumulasikan. Ketika mengikat maka akan terjadi monopoli, sehingga penentuan harga (biaya pendidikan) tanpa ada penawaran dan permintaan terlebih dahulu dengan para pengguna jasa pendidikan. Pengelola pendidikan pun menawarkan harga (biaya pendidikan) tanpa memikirkan kemampuan dari pihak pengguna jasa pendidikan. Jelas hal ini akan merugikan bagi pihak pengguna jasa pendidikan, karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menawar harga (biaya pendidikan). Akhirnya, akan muncul kesenjangan-kesenjangan bahwa orang yang kaya lah yang bisa mendapatkan pendidikan tersebut. Sedangkan bagi pihak pengguna jasa pendidikan yang kurang mampu, akan kesulitan dalam mendapatkan pendidikan tersebut.⁶

Kapitalisasi pendidikan di Indonesia mulai begitu terasa setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU) pada tanggal 17 Desember 2008. Cukup mengherankan memang, sebuah UU yang berpotensi menyusahkan masyarakat kelas bawah namun lolos begitu saja tanpa adanya penolakan yang berarti, kecuali sejumlah demonstrasi mahasiswa yang kemudian hilang begitu saja.

“Substansi dari RUU BHP ini adalah tekanannya pada tata kelola badan hukum pendidikan. Tanpa disadari, tekanan pada tata kelola itu adalah ciri dari suatu korporasi, yang misi utamanya adalah mencari untung. Korporasi menekankan pentingnya sisi tata kelola agar lebih efisien dan produktif sehingga dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk dapat melakukan investasi yang lebih besar lagi. Ketika RUU BHP tersebut disahkan menjadi Undang-Undang, maka UU BHP itu secara sistematis membentuk lembaga-lembaga pendidikan formal sebagai suatu korporasi.”⁷

Darmaningtyas mengemukakan, kapitalisasi, privatisasi, dan liberalisasi sektor pendidikan melalui UU BHP-serta peraturan-peraturan lain yang mengikutinya - dan RSBI itu kelak akan mengantarkan bangsa Indonesia bangsa Indonesia ke dalam jurang kehancuran untuk selamanya, karena sumber daya alam makin habis,

⁶ Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakkan*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), hal. 3.

⁷ Darmaningtyas dkk, *Melawan Liberalisme Pendidikan*, (Jawa Timur: Madani, 2014), hal. vii

tapi di sisi lain warga Indonesia tidak pintar, sehingga menjadi bangsa terjajah selamanya.⁸ Jadi, adanya kapitalisasi dalam dunia pendidikan sangat merugikan masyarakat dan masa depan bangsa ini, baik saat ini maupun di masa depan.

B. Wujud Kapitalisme dalam Dunia Pendidikan

Kapitalisme pendidikan menurut Francis Wahono⁹ berarti arah pendidikan dibuat sedemikian rupa sehingga pendidikan menjadi pabrik tenaga kerja yang cocok untuk tujuan ekonomi kapitalis tersebut. Kurikulum juga diisi dengan pengetahuan dan keahlian untuk industrialisasi, baik manufaktur maupun agroindustri. Pertahanan ekonomi lama dari sebagian besar rakyat, seperti pertanian, perkubunan rakyat, pertambangan rakyat dan perikanan rakyat, dijadikan timbal untuk memberikan pelayanan berupa tenaga kerja murah eks sektor primer, tanah dan makanan untuk buruh sektor industri. Mengapa industrialisasi?

Sebab pasar selalu mencari nilai tukar produk yang tertinggi. Nilai produk yang tertinggi secara relatif adalah dari segi teknologi dan pengetahuan lebih unggul. Itu adalah produk hasil karya negara-negara bermodal besar. Itu yang menjajah pasar negara berkembang maupun menjajah sistem nilai tukar barang. Akhirnya juga menjajah secara nilai tukar mata uang yang terkait dengan sistem *Bretton Woods* yakni IMF dengan SDR-nya dan Worl Bank dengan Kredit Pembangunannya, yang pada gilirannya diikuti dengan hutang yang terakhir dengan perangkap hutang dari negara-negara maju maupun bank-bank negara maju terhadap negara berkembang. Perangkap hutang menjadi pengendalian empuk dari negara dan pemain negara maju juga karena mereka memberikan hutang pada rejim dan penguasa negara berkembang yang korup. Itulah globalisasi perdagangan, ilmu, teknologi, sistem hukum, keuangan, kebijakan ekonomi, kebijakan industrialisasi yang mengorbankan pertanian, dan politik serta pola hidup dan konsumsi.¹⁰

Menurut HAR Tilaar, pendidikan merupakan salah satu sumber daya ekonomi atau salah satu *capital* manusia bagi pertumbuhan

⁸ Darmaningtiyas dkk, *Melawan Liberalisme Pendidikan*. hal. ix

⁹ Francis Wahono. *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset: 2001), hal: 6

¹⁰ Francis Wahono. *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan....* hal: 6

ekonomi. Oleh sebab itu pula, organisasi atau lembaga pendidikan haruslah ditata menurut prinsip-prinsip ekonomi yang efisien dan produktif dengan biaya yang rendah. Dengan sendirinya subjek peserta didik bukan lagi dihargai sebagai pribadi yang sedang mengembangkan kemampuannya, tetapi merupakan objek ekonomis untuk meningkatkan produktifitas.¹¹

Mengenai invasi ilmu ekonomi ke dalam pendidikan ini, menurut HAR Tilaar, kita harus berlapang dada menerima pandangan-pandangan disiplin lain yang memang telah menunjukkan hasil-hasilnya yang positif. Pandangan interdisiplin mengenai pendidikan merupakan suatu keharusan dalam dunia terbuka dewasa ini. Namun demikian, kita tidak dapat bersifat terpaksa dengan masuknya konsep-konsep ekonomi dalam dunia pendidikan. Perlu diingat dunia pendidikan bukanlah suatu organisasi dan kegiatan untuk mencari keuntungan (*provit*). Ketika pandangan ekonomis mengenai pendidikan telah mencapai tujuannya ialah efisiensi dan provit, maka ilmu pendidikan tetap mempertanyakan apakah lembaga pendidikan tersebut telah mencapai hasilnya ialah memanusiaikan manusia yaitu peserta didik.¹²

Apa yang disampaikan HAR Tilaar cukup beralasan. Sebab, lembaga pendidikan sejatinya adalah wahana untuk memanusiaikan manusia. Jika pendidikan telah berubah ke arah provit oriented, hanya mencari keuntungan ekonomi semata, maka akan membebani masyarakat miskin, lalu institusi pendidikan praktis hanya mampu dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke atas (kaya). Ketika pendidikan hanya mampu dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke atas, maka sumber daya ekonomi pada tahap berikutnya praktis hanya menjadi ladang masyarakat kelas atas. Itu artinya, masyarakat miskin semakin miskin. Dan kemiskinan niscaya akan mencegah bangsa ini dari arah menuju kemajuan dan kebangkitan.

Secara praktis, kapitalisasi pendidikan terwujud akibat adanya kebijakan liberalisasi bidang pendidikan oleh negara. sementara kebijakan yang bersifat liberal ditandai dengan berubahnya status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (PT BHM), diterapkannya manajemen berbasis sekolah (MBS),

¹¹ HAR Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2009), hal. 39

¹² HAR Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2009), hal: 39-40

pembentukan Badan hukum pendidikan, internasionalisasi pendidikan dengan obsesi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), setifikat ISO, serta penciptaan standarisasi pendidikan lainnya.¹³

C. Dampak Kapitalisasi Pendidikan

Banyak dampak negatif dari kapitalisasi pendidikan yang lahir karena kebijakan pendidikan yang neoliberal dan kapitalistik, antara lain yaitu:

1. Memperlebar Kesenjangan si Miskin dan si Kaya

Munculnya istilah “Sekolah Bertaraf Internasional” atau SBI sebetulnya tidak lepas dari hasil kerja capital global yang ingin mencari legitimasi untuk menjual produk-produk jasa mereka, khususnya jasa pendidikan dan pelatihan. Penjelasan ini secara mudah dapat dirunut melalui peran Bank Dunia yang memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia untuk program peningkatan mutu pendidikan, baik untuk sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun dibawah Kementerian Agama, seperti Madrasah.¹⁴

Mahalnya biaya masuk ke sekolah-sekolah berlabel RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) telah menyebabkan hilangnya akses banyak anak yang cerdas ke sekolah-sekolah favorit karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya sekolah.¹⁵

2. Hilangnya Kedaulatan Rakyat dalam Pendidikan

Rakyat dalam terminologi ideologis adalah representasi dari golongan miskin. Oleh sebab itu, ketika kita mengatakan bahwa rakyat telah kehilangan kedaulatannya dalam pendidikan, maka pernyataan itu telah menunjukkan pada kelompok miskin di negeri ini.¹⁶ Akibat lainnya yaitu seperti, semakin meningkat angka putus sekolah. Semakin berkurang atau bahkan hilangnya peran negara dalam duniapendidikan, akan berdampak buruk bagi masyarakat, kemiskinan semakin menggurita. Hal ini terjadi dikarenakan banyak anak usia sekolah yang gagal atau putus sekolah karena

¹³ Darmaningtiyas dkk, *Melawan Liberalisme Pendidikan..* hal: 43

¹⁴ Darmaningtiyas dkk, *Melawan Liberalisme Pendidikan..* hal: 176

¹⁵ Darmaningtiyas dkk, *Melawan Liberalisme Pendidikan..* hal: 181

¹⁶ Darmaningtiyas dkk, *Melawan Liberalisme Pendidikan..* hal: 203

ketidakmampuan membayar dana pendidikan yang mahal, sehingga ia akan kesulitan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.¹⁷

Dampak lainnya yaitu bahwa negara tidak mempunyai peran aktif. Ketika satuan pendidikan dikapitalisasi, maka peran negara hanya sebagai fasilitator. Yang berperan aktif mengelola lembaga pendidikan adalah pihak swasta. Kedudukan kampus atau sekolah otonom dari pemerintah, negara tidak ikut campur tangan terhadap pengelolaan pendidikan atau sekolah. Hal tersebut menuntut lembaga sekolah kreatif dalam mencari dana bila ingin tetap bertahan. Kemungkinan yang terjadi, membuka bisnis atau menaikkan biaya pendidikan, sehingga pendidikan memang benar-benar dikomersilkan, bila sudah demikian biaya pendidikan semakin mahal, sehingga akan sulit dijangkau masyarakat yang kurang mampu.¹⁸

Begitu juga, yang paling vatal, kapitalisasi pendidikan menyebabkan hanya golongan menengah ke atas yang bisa mengakses pendidikan baik. Biaya pendidikan yang mahal akan sulit dijangkau oleh masyarakat yang berpendapatan rendah. Anak usia sekolah akan meninggalkan bangku kelas. Mereka akan lebih memilih bekerja dari pada sekolah.¹⁹

Yang menyedihkan, peserta didik hanya sebagai customer customer atau konsumen pembeli produk pendidikan.²⁰ Dan akhirnya, tujuan pendidikan semakin kabur. Ini merupakan dampak yang paling sangat menonjol karena perubahan orientasi pendidikan adalah berubahnya tujuan penyelenggaraan pendidikan. Padahal, terselenggaranya pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan oleh UU.²¹

¹⁷ Asep Sapa'at, *Stop Menjadi Guru*, (Jakarta: Tangga Pustaka, 2012), hal: 113.

¹⁸ Masdar Farid Masudi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hal. 83.

¹⁹ Ayu Hermawan, *Indonesiaku!, Sebentuk Manikam Untukmu: Dedikasi Seorang Guru : Biografi Profesor Doktor Henry Alexis Rudolf Tilaar*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal: 52-53.

²⁰ Evie Ngangi, *Lekuk Liku Bisnis Pendidikan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hal: 75.

²¹ Pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1.

D. Pengaruh Kapitalisasi Pendidikan di Aceh

Sebagai bagian dari sistem pendidikan Indonesia, pendidikan Aceh tentu saja tidak bebas dari serbuan kapitalisme. Lalu sejauh mana kapitalisasi pendidikan dalam dunia pendidikan Aceh telah memberi pengaruh sejauh ini? Ini pertanyaan yang menuntut kajian mendalam sebelum mengupasnya secara memuaskan. Namun beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan Aceh tidak bebas penetrasi ideologi kapitalisme, khususnya apabila kita menelaah prinsip-prinsip dasar ideologi kapitalisme, dampaknya dan bagaimana ideologi ini dipraktekkan di dunia pendidikan secara umum.

Di level nasional, penelitian Darmaningtyas dan kawan-kawan, menunjukkan telah terjadi praktik-praktik neoliberalisme pendidikan dalam dunia pendidikan Indonesia, yang dimulai dengan swastanisasi; dari PTN ke BHMN, biaya kuliah yang semakin mahal, praktek jualan gelar, jebakan pada ranking, manajemen berbasis sekolah, Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah-Sekolah Bersertifikat ISO 9001:2000, Sekolah-Sekolah Internasional.²²

Dan praktek-praktek neoliberalisme pendidikan ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap pendidikan nasional. Misalnya, swastanisasi pendidikan yang mempersulit akses masyarakat, disorientasi pendidikan nasional, Sekolah Bertaraf Internasional yang memperlebar dampak kesenjangan masyarakat, korporatisasi pendidikan, hilangnya idealisme dan integritas intelektual, melepaskan tanggung jawab dan diskriminasi pada swasta, Hilangnya kedaulatan rakyat dalam pendidikan dan sebagainya.²³

Nampaknya, hasil penelitian level nasional di atas juga berlaku dalam konteks Aceh. Dari prinsip-prinsip dan dampak yang sudah dijabarkan di atas, penetrasi ideologi kapitalisme dalam dunia pendidikan Aceh saat ini telah semakin terlihat kentara pengaruhnya dalam pendidikan Aceh. Apalagi jika ideologi kapitalisasi pendidikan ini kita bandingkan dengan konsepsi Islam yang menjadi ideologi dan pandangan *mainstream* masyarakat Aceh.

Di Aceh, meskipun kemudian mendapatkan penolakan dari sejumlah masyarakat, efek kapitalisasi pendidikan sebagai konsekuensi dari liberalisasi pendidikan juga dibuktikan dengan munculnya Sekolah

²² Darmaningtyas dkk, *Melawan Liberalisme Pendidikan...*, hal: 41-139

²³ Darmaningtyas dkk, *Melawan Liberalisme Pendidikan...*, hal: 154-203

Bertaraf Internasional (SBI) di Aceh, seperti di Langsa²⁴, Takengon²⁵, Banda Aceh²⁶ dan sebagainya. Kendatipun demikian, pada tahun 2013 lalu, 20 SBI di Aceh dialihkan menjadi sekolah mandiri setelah keluarnya putusan MK yang mencabut status RSBI di seluruh Indonesia.²⁷ MK menganggap RSBI memunculkan diskriminasi dalam pendidikan dan membuat sekat antara lembaga pendidikan.²⁸

Kendati pun RSBI telah dicabut, namun sepertinya ideologi kapitalisme cenderung telah dipraktekkan. Salah satu pengaruh kapitalisasi pendidikan di Aceh adalah tingginya biaya pendidikan pada institusi pendidikan tertentu yang dalam prakteknya sangat memberatkan masyarakat miskin. Pada tahun 2013 misalnya, sekolah-sekolah swasta di Aceh, dengan alasan memiliki mutu dan infrastruktur yang bagus, memasang biaya pendaftaran sampai puluhan juta Rupiah. Misanya, sekolah Fatih Bilingual School, dalam penelusuran Harian *Serambi Indonesia*, sekolah ini mematok biaya pendaftaran yang mencapai Rp 25 .000.000 untuk mendaftar SMP/SMA. Sementara untuk tingkat SD mencapai Rp 15 Juta.²⁹

Bahkan, pendidikan dasar pun sudah terjangkiti virus kapitalisme. Sebagaimana dilapor kembali Harian *Serambi Indonesia* pada tahun 2015 yang lalu, tentang Ibu-ibu yang mengeluh besarnya biaya untuk memasukkan anak ke SD/MI.³⁰ Ibu muda beranak satu yang diceritakan dalam laporan ini mengeluh dengan permintaan si buah hati yang duduk di bangku kelas III sebuah madrasah ibtidaiyah

²⁴ SMPN 1 Langsa, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Lihat link: <http://aceh.tribunnews.com/2011/09/10/rintisan-sekolah-bertaraf-internasional>. Diakses tanggal 7 Januari 2017.

²⁵ SMU 4 Takengon Jadi Sekolah Bertaraf Internasional. Lihat link: <http://www.acehkita.com/smu-4-takengon-jadi-sekolah-bertaraf-internasional/>. Diakses tanggal 7 Januari 2017.

²⁶ Banda Aceh Miliki Sekolah Bertaraf Internasional: Lihat link: <http://theglobejournal.com/pendidikan/banda-aceh-miliki-sekolah-bertaraf-internasional/index.php>. Diakses tanggal 7 Januari 2017

²⁷ Sumber: <http://atjehpost.co/berita1/read/Ini-20-Sekolah-Menengah-Atas-Berstatus-RSBI-di-Aceh-34722>. Diakses tanggal 7 Januari 2017.

²⁸ Lihat berikut ini: <http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/08/18431250/Ini.Alasan.MK.Batalkan.Sta.tus.RSBISBI>. Diakses tanggal 7 Januari 2017.

²⁹ Sumber: <http://aceh.tribunnews.com/2013/05/11/biaya-masuk-fbs-rp-25-juta>. Diakses pada 20 Februari 2016.

³⁰ Lihat laporan Harian *Serambi Indonesia* di link berikut ini: <http://aceh.tribunnews.com/2015/09/18/mahalnya-biaya-pendidikan-dasar>. Diakses pada 20 Februari 2016

negeri (MIN) di Kota Banda Aceh. Penyebabnya, apalagi kalau bukan permintaan uang untuk membeli buku buat si anak.

Dalam laporan Harian Serambi Indonesia ini juga disebutkan, di beberapa sekolah dalam lingkup kabupaten/kota di Aceh juga menunjukkan hal serupa. Biaya masuk biasanya jutaan rupiah. MIN 1 Banda Aceh, misalnya, biaya masuk untuk murid baru hampir Rp 2 juta, meskipun tentu atas persetujuan komite sekolah. Begitu pula dengan MIN Masjid Raya dan beberapa sekolah madrasah negeri lainnya di sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

Selain contoh-contoh di atas, sudah lumrah diketahui pula bahwa terdapat lembaga-lembaga pendidikan di Aceh yang *bisnis oriented*, karena menyelenggarakan pendidikan hanya untuk mencetak tenaga kerja. Artinya, manusia dididik dan didesain sedemikian rupa khusus untuk bekerja, bukan untuk memperoleh pendidikan itu sendiri dimana ini merupakan pengaruh dari cara pandang materialisme sebagai ideologinya sistem kapitalisme.

E. Pandangan Islam Terhadap Kapitalisme Pendidikan

Kapitalisasi pendidikan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam tidak membedakan hak dan kewajiban seseorang berdasarkan harta atau suku bangsanya, namun berdasarkan taqwa. Mengingat pendidikan adalah faktor penting dalam memperoleh ilmu, maka Islam menghendaki bahwa hak memperoleh pendidikan bisa terakses oleh semua individu baik itu dalam bentuk perintah memberikan pendidikan ataupun perintah mencarinya.

Paham kapitalisme ini secara jelas dicela dalam Islam dimana Islam memandang hak untuk mendapatkan pendidikan adalah sama bagi setiap umat. Tujuan akhir dari pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dari cita-cita ajaran Islam itu sendiri yang membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.³¹

Dalam Islam, manusia sama sekali tidak dibeda-bedakan yang menandakan bahwa hak memperoleh pendidikan adalah juga berlaku bagi siapa saja. Lebih dari itu, materialisme sebagai akar ideologi

³¹ Prof.H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, cetakan keempat, (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2009), hal: 28

kapitalisme telah sangat jelas mendapat justifikasi dan penentangan dari ajaran Islam.

Allah Swt berfirman:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“*Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.*” (QS. al-Kahfi: 7)

Di ayat lain, Allah Swt juga menegaskan bahwa balasan terbaik adalah dari Allah Swt, bukan dari apa yang disebut atau dinilai sebagai materi.

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

“*Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar".*(QS Al-Qashshash ayat 80).

Materialisme dalam konteks Islam adalah ujian bagi manusia, khususnya bagi kita umat Islam. Maka penyelenggaraan pendidikan dalam perspektif Islam tidak boleh mengabaikan dimensi ukhrawi, bahwa pendidikan harus memiliki orientasi menuju kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pendidikan tidak boleh hanya untuk *provit oriented* sebagaimana yang dipraktekkan dalam tatanan sistem kapitalisme. Maka Islam menolak kapitalisasi oleh karena Islam memiliki *akhirat oriented*, bukan *materi oriented*.

Sementara itu, Mahmud Al Khalidi menyatakan, bahwa manusialah yang membuat sistem (untuk mengatur) kehidupannya. Dengan demikian akidah kapitalisme tersebut telah memberikan kebebasan mutlak kepada manusia dalam mengemukakan pendapat, berakidah dan kepemilikan yang dari sanalah lahir sistem kapitalis. Karena itu, *Capitalism* merupakan sesuatu yang paling menonjol dalam

ideologi Kapitalis dilihat dari aspek *labeling* sesuatu berdasarkan substansinya yang paling menonjol.³²

Dalam konteks Aceh, penerapan Syari'at Islam juga menghendaki adanya penyebaran nilai-nilai Islam lewat institusi pendidikan kepada setiap umat Islam. Sebab, Syari'at Islam yang diterapkan di Aceh memiliki tujuan untuk menciptakan semua generasi muslim yang berguna bagi agama dan bangsa.

Membentuk kepribadian Islam pada hakikatnya merupakan perwujudan dari konsekuensi seorang muslim, yakni bahwa sebagai muslim ia harus memegang identitas kemuslimannya dalam seluruh aktivitas kehidupan. Identitas ini menjadi kepribadian yang tampak pada pola pikir (*aqliyah*) dan bersikapnya (*nafsiyah*) yang dilandaskan pada ajaran Islam. Konsekuensi logis ini menjadikan Syari'at Islam sebagai patron yang memandu sisi kehidupan yang dijalani oleh setiap muslim.³³

Hal ini juga diperjelas oleh Al Yasa' Abubakar, bahwa semua anak muslim yang ada di Aceh akan dituntun dan didorong sedemikian rupa oleh lembaga pendidikan yang dia masuki, sehingga ketika dewasa nanti mereka akan menjadi muslim yang baik, istiqamah dalam penderian, serta tangguh dan mandiri dalam berusaha, dan lebih dari itu bisa menolong keluarga dan masyarakat sekitarnya".³⁴

F. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kapitalisasi pendidikan sangat membahayakan tujuan dari pendidikan itu sendiri, apalagi jika dikaitkan dengan pendidikan Islam sebagai agama yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia, khususnya di Aceh. Kapitalisasi pendidikan menyebabkan orang-orang miskin sangat sulit mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas, di samping itu juga menyebabkan negara tidak lagi mampu berperan sebagai penjamin bagi kebutuhan hak-hak warganya.

³² Mahmud Al Khalidi, *Kerusakan dan Bahaya Sistem Ekonomi Kapitalis*. (Jakarta: Wahyu Press, 2002), hal: 13

³³ Mujiburrahman dkk, *Pendidikan Berbasis Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2012), hal: 48.

³⁴ Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 85

Pengaruh kapitalisasi pendidikan sebagai efek neoliberalisasi pendidikan ikut terasa di Aceh dalam beberapa bentuk seperti hadirnya RSBI meskipun kemudian dicabut oleh MK. Bahwa tingginya biaya pendidikan di sejumlah institusi pendidikan di Aceh bisa disimpulkan sebagai fenomena atau gejala terjangkitnya Aceh oleh ideologi kapitalisme dalam dunia pendidikan. Dalam perspektif pendidikan Islam, kapitalisasi pendidikan yang berideologikan materialisme bertentangan dengan ajaran Islam dimana Islam menghendaki proses memanusiakan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Sapa'at, 2012, *Stop Menjadi Guru*, Jakarta: Tangga Pustaka
- Ayu Hermawan, 2007, *Indonesiaku!, Sebentuk Manikam Untukmu: Dedikasi Seorang Guru : Biografi Profesor Doktor Henry Alexis Rudolf Tilaar*, Jakarta: Grasindo
- Arifin, H.M, 2009, *Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauah Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, cetakan keempat, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Al Yasa' Abubakar, 2006, *Syari`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Prov. Nanggroe Aceh Darussalam
- Ahmad D. Marimba, 1989, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif
- Darmaningtyas, Edi Subkhan, Fahmi Panimbang, 2014, *Melawan Liberalisme Pendidikan*, Jawa Timur: Madani.
- Darmaningtyas, 2005 *Pendidikan Rusak-Rusakkan*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Evie Ngangi, 2010, *Lekuk Liku Bisnis Pendidikan*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Francis Wahono, 2001, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- HAR Tilaar, 2009, *Kekuasaan dan Pendidikan*, Rineka Cipta: Jakarta,
- Masdar Farid Masudi, , 1991, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus

Mahmud Al Khalidi, 2002, *Kerusakan dan Bahaya Sistem Ekonomi Kapitalis*, Jakarta: Wahyu Press

Mujiburrahman dkk, 2012, *Pendidikan Berbasis Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, Dinas Syari'at Islam

Pembukaan UUD 1945, dan batang tubuh UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1.

Sumber Internet:

<http://aceh.tribunnews.com/2013/05/11/biaya-masuk-fbs-rp-25-juta>.

<http://aceh.tribunnews.com/2015/09/18/mahalnya-biaya-pendidikan-dasar>

<http://aceh.tribunnews.com/2011/09/10/rintisan-sekolah-bertaraf-internasional>.

<http://www.acehkita.com/smu-4-takengon-jadi-sekolah-bertaraf-internasional/>.<http://theglobejournal.com/pendidikan/banda-aceh-miliki-sekolah-bertaraf-internasional/index.php>.

<http://atjehpost.co/berita1/read/Ini-20-Sekolah-Menengah-Atas-Berstatus-RSBI-di-Aceh-34722>.

<http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/08/18431250/Ini.Alasan.MK.Batalkan.Status.RSBISBI>.

<http://aceh.tribunnews.com/2013/05/11/biaya-masuk-fbs-rp-25-juta>.

<http://aceh.tribunnews.com/2015/09/18/mahalnya-biaya-pendidikan-dasar>.

http://zaynpedia.blogspot.co.id/2014/09/kapitalisasi-pendidikan-dampak_17.html. Diakses tanggal 7 Januari 2017.